

MENINGKATKAN KUALITAS DAN EFISIENSI LAYANAN KESEHATAN : *STRATEGIC PURCHASING* DALAM PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI INDONESIA

Aurelia Editha Lesmana^{1*}, Putri Oktamaria Sihole², Riswandy Wasir³

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta^{1,2,3}

*Corresponding Author : 2110713024@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menyajikan tinjauan literatur mengenai peningkatan kualitas dan efisien pelayanan kesehatan dengan fokus utama kepada *strategic purchasing* dalam program jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Perubahan dalam segmentasi pasar, sistem pembayaran, dan kebijakan kesehatan menuntut rumah sakit untuk beradaptasi guna dapat menyeimbangkan perkembangan zaman dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tinjauan ini menggunakan metode desain studi literature review dengan tujuan untuk mengeksplorasi *strategic purchasing* dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan dalam program jaminan kesehatan nasional. Hasilnya menunjukkan penerapan prinsip *strategic purchasing* telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, efisiensi biaya, dan integrasi data dalam program JKN. Diketahui dengan prinsip *strategic purchasing*, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun, masih ditemukan beberapa tantangan dalam implementasi *strategic purchasing* berupa pengelolaan sisa lebih dana kapitasi, regulasi yang belum memadai, dan peningkatan kepesertaan yang masih rendah. Untuk itu, dilakukannya langkah-langkah strategis untuk menguatkan prinsip *strategic purchasing* dalam pelayanan kesehatan berupa penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar stakeholder, dan pembekalan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PNPK). Kesimpulannya, Meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, langkah-langkah strategis dan kolaborasi antar stakeholder dapat memperkuat implementasi *Strategic Purchasing* untuk mencapai tujuan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Prinsip *strategic purchasing* terbukti meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan melalui pengelolaan yang lebih baik dari sumber daya finansial yang tersedia untuk provider layanan kesehatan.

Kata kunci : efisiensi, jaminan kesehatan nasional, *strategic purchasing*

ABSTRACT

This article presents a literature review on improving the quality and efficiency of health services with a particular focus on strategic purchasing in Indonesia's national health insurance program.. This review uses the literature review study design method with the aim of exploring strategic purchasing in improving the quality and efficiency of health services in the national health insurance program. The results show that the application of strategic purchasing principles has made a positive contribution to improving the quality of health services, cost efficiency, and data integration in the JKN program. It is known that with the principle of strategic purchasing, the improvement in the quality of health services can be felt by the community. However, there are still some challenges in the implementation of strategic purchasing in the form of management of excess capitation funds, inadequate regulations, and low membership. For this reason, strategic steps are taken to strengthen the principles of strategic purchasing in health services in the form of strengthening regulations, increasing coordination between stakeholders, and debriefing the Infection Prevention and Control Program (PNPK). In conclusion, although still faced with a number of challenges, strategic steps and collaboration between stakeholders can strengthen the implementation of Strategic Purchasing to achieve better health goals for the people of Indonesia. Strategic purchasing principles are proven to improve the efficiency and effectiveness of the health system through better management of the financial resources available to health care providers.

Keywords : efficiency, national health insurance, *strategic purchasing*

PENDAHULUAN

Sejak diperkenalkannya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, upaya pembiayaan kesehatan di Indonesia telah mencapai titik penting dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. BPJS Kesehatan, sebagai entitas yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, memiliki mandat yang luas, termasuk pengelolaan pendaftaran peserta, pengumpulan iuran, pengelolaan dana jaminan sosial, dan diseminasi informasi terkait kepada masyarakat (Kemenkes, 2004). Harapannya, keselamatan finansial sebagian besar masyarakat Indonesia dapat terjamin melalui manfaat yang ditawarkan oleh BPJS sebagai lembaga jaminan kesehatan dan sosial nasional (Rusady, 2016).

Perubahan yang dinamis dalam segmentasi pasar, sistem pembayaran, dan kebijakan strategis telah mendorong rumah sakit untuk berinovasi dalam menyediakan layanan medis yang mutakhir dan selaras dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan medis terkini. Sesuai dengan arahan yang tertuang dalam UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit dituntut untuk bersifat fleksibel dan mudah beradaptasi dalam menghadapi dinamika tersebut (Kementrian Kesehatan RI, 2009). Oleh karena itu, BPJS Kesehatan mengadopsi prinsip belanja *Strategic Purchasing* sebagai strategi untuk meningkatkan kinerja sistem kesehatan Indonesia melalui alokasi dana yang efisien kepada penyedia layanan kesehatan (Prabowo et al., 2021)

Pentingnya *Strategic Purchasing* dalam konteks JKN telah diakui oleh BPJS Kesehatan, yang telah menetapkan enam Fokus Utama Badan pada tahun 2022 untuk menjaga kontinuitas program ini. Dalam perspektif ini, *Strategic Purchasing* muncul sebagai alat transparansi yang vital dalam meningkatkan kinerja sistem kesehatan suatu negara. Pada hakikatnya, penerapan konsep *strategic purchasing* dalam BPJS Kesehatan dapat berpengaruh pada komunikasi beserta kolaborasi antara supplier dengan kinerja instansi rumah sakit itu sendiri (Zeplin Jiwa Husada Tarigan, 2009). Pendekatan inovatif dalam *Strategic Purchasing* dapat membawa perbaikan signifikan dalam kualitas layanan kesehatan, kepuasan peserta, efisiensi, aksesibilitas layanan, serta akuntabilitas (Wahidah & Yusuf, 2022).

Menurut Ghoddoosi-Nezhad et al., 2017 mengatakan bahwa *strategic purchasing* di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan memiliki lima kriteria yang penting, yaitu apa yang dibeli, untuk siapa dibeli, dari siapa dibeli, berapa banyak yang dibeli, dan bagaimana cara untuk membelinya dan setiap pembelian yang menjawab lima dari pertanyaan ini maka bisa berubah menjadi strategis. Kebijakan Kesehatan Indonesia., 2017 berpendapat terkait tujuan pembelian strategis BPJS yaitu mengidentifikasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang wajib untuk dibeli dengan tetap mempertimbangkan efektivitas dari biaya, memilih penyedia layanan, mempertimbangkan mutu pelayanan, pemerataan, sumber daya manusia, serta menentukan seberapa efektif dan efisien dari pelayanan kesehatan

Adapun pendapat dari Pribadi & Setijaningrum, 2023 terkait *strategic purchasing* yang dimana *strategic purchasing* ini dapat memberikan suatu kemajuan di dalam sektor kesehatan seperti efisiensi, kesehatan, keberlanjutan, akuntabilitas, dan juga kepuasan pengguna. Menurut Honda et al., 2016 dalam pembelian strategis (*strategic purchasing*), adanya berbagai kerangka hubungan antara prinsipal dengan agen yang bisa digunakan untuk mendefinisikan hubungan antara pembeli dengan penyedia, pemerintah dengan pembeli, dan juga masyarakat dengan pembeli.

Meskipun *Strategic Purchasing* menawarkan potensi besar dalam mengoptimalkan layanan kesehatan, implementasinya di rumah sakit masih menghadapi sejumlah tantangan. Permasalahan yang terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, perencanaan yang tidak optimal, serta kerjasama antara pihak asuransi dan sektor swasta masih menjadi hambatan utama (Pujiyanti et al., 2020).

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan urgensi isu-isu yang terkait dengan implementasi *Strategic Purchasing* dalam JKN, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi dampaknya terhadap kualitas layanan kesehatan di Indonesia pada era JKN. Melalui pendekatan literatur review, diharapkan penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang implementasi *Strategic Purchasing* dalam konteks kesehatan Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi *literature review* atau kajian literatur. Kajian literatur ini menggunakan 5 artikel ilmiah yang dijadikan sebagai bahan referensi utama dalam penelitian ini. Pencarian kajian literatur ini menggunakan Google Scholar dengan kata kunci dalam Bahasa Indonesia (Efisiensi, JKN, *Strategic Purchasing*) maupun Bahasa Inggris (*Efficiency, JKN, Strategic Purchasing*). Artikel yang sudah dipilih akan dianalisis untuk mendapatkan informasi data terkait topik yang akan dijadikan pembahasan. Hasil dari analisis data akan disintesis serta diinterpretasikan dalam bentuk tabel dan juga narasi untuk memberikan gambaran terkait penerapan *Strategic Purchasing* dalam konteks JKN.

HASIL

Tabel 1. Hasil Literature Review

Peneliti	Judul	Tahun Studi	Metode	Hasil Penelitian
Khaula Karima, Puput Oktamianti	Peran JKN untuk Eliminasi Tuberkulosis di Indonesia	2024	<i>Scoping Review</i>	Dalam rangka mengeliminasi TBC, kemenkes dan BPJS K bekerja sama melaksanakan uji coba Pilot <i>Strategic Health Purchasing</i> (SHP) dengan memberikan insentif tambahan kepada FKTP yang bekerjasama dengan BPJS K dalam hal mendiagnosis TBC, mengobati pasien TBC, dan mengobati pasien TBC sampai sembuh. Dengan kualitas pengobatan TBC melalui belanja kesehatan. <i>Strategic Health Purchasing</i> ditemukannya peningkatan kualitas pelayanan TBC dalam hal melaporkan kasus TBC, peningkatan kualitas data TBC, serta terjadinya integrasi dan pertukaran data antara BPJS dan program TBC.
M Kurniawan, Faozi dkk	Pengelolaan Sisa Dana Lebih Di Kapitasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Monitoring dan	2017	Studi Kasus <i>Cross Sectional</i>	Sebagian besar daerah menyatakan bahwa sisa lebih dana kapitasi paling banyak diperoleh dari alokasi dana operasional. Dana kapitasi yang dialokasikan untuk jasa pelayanan terserap habis, sedangkan yang dialokasikan untuk operasional tidak dapat

	Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia)			terserap penuh. Adanya sisa lebih dana kapitasi juga terbukti berhubungan negatif dengan jasa pelayanan. Sebagian besar Puskesmas belum mengelola sisa lebih kapitasi karena belum terdapat Perda dan pedoman teknis pelaksanaan. Selain perlu adanya evaluasi <i>fund channeling</i> , penguatan regulasi sebaiknya juga diikuti dengan optimalisasi peran BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan stakeholder lainnya untuk mendukung penerapan <i>strategic purchasing</i> .
Yusi Anggriani, dkk	Tata Kelola Obat JKN : Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS-K) dalam Belanja Obat Strategis	2023	Kualitatif	Permasalahan kekurangan obat yang dialami disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kemampuan SDM yang terbatas, proses perencanaan yang tidak optimal, kendala proses pengadaan dengan <i>e-purchasing</i> , perbedaan harga obat pada sistem <i>e-purchasing</i> dan manual pembelian, serta waktu tunggu pemesanan obat yang lama. BPJS-K sebagai <i>strategic purchasing</i> kesehatan berpeluang untuk membuat sistem informasi penggunaan seluruh obat dalam pelayanan JKN, pembentukan Dewan Pertimbangan Obat JKN, dan melakukan peninjauan peraturan dan koordinasi antar lembaga pembuat kebijakan.
Zidratul Gemilang Ahmad, Luthfiyah Nada Salsabila, Dinda Febriani, Fitriani Pramita Gurning	Analisis Defisit Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Medan: Sebab, Dampak, dan Solusi	2023	Penelitian Sekunder Kuantitatif	Minimnya pengguna JKN di Medan, disebabkan oleh kepesertaan JKN yang baru 80%, pungutan yang masih rendah, dan persyaratan beban rumah sakit yang tinggi akibat penyakit katastropik yang serius. Solusi dalam mengatasi kekurangan JKN di Kota Medan salah satunya menggunakan <i>strategic purchasing</i> sebagai sumber dana lain untuk JKN. Namun, ditemukan beberapa tantangan dalam <i>strategic purchasing</i> tersebut, diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> • Regulasi yang belum mumpuni serta kerjasama antara pihak asuransi swasta yang belum banyak terjalin.

- Penyalahgunaan yang tinggi dan mahal akan manfaat pelayanan tertentu

Muhayyina Wahidah, Irawan Yusuf	Efektivitas Peran dan Fungsi Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi dalam Memberikan Rekomendasi Penyelesaian Klaim <i>Dispute</i> di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023	2022	Deskriptif Kuantitatif	Untuk memperoleh pencapaian yang telah menjadi fokus utama BPJS-K guna menjaga kesinambungan Program JKN, maka diperlukannya transparansi yaitu berupa <i>Strategic Purchasing</i> guna meningkatkan fungsi terhadap kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan peserta, efisiensi, akses pelayanan kesehatan, dan akuntabilitas. Di dalam pelaksanaannya, masih ditemukan klaim <i>dispute</i> yang belum sesuai dengan pedoman <i>strategic purchasing</i> . Hal itu kemudian dapat ditangani dengan membentuk Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB).
---------------------------------	---	------	------------------------	--

Lima artikel yang dikaji pada tabel mencakup berbagai aspek strategis, mulai dari peningkatan kualitas layanan kesehatan, efisiensi biaya, hingga tantangan dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *strategic purchasing*, seperti uji coba Pilot *Strategic Health Purchasing* (SHP) dalam meningkatkan kualitas layanan TBC, memberikan kontribusi positif terhadap pelaporan kasus TBC dan integrasi data. Namun, terdapat tantangan dalam pengelolaan sisa lebih dana kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah, seperti hubungan negatif dengan jasa pelayanan dan perlunya penguatan regulasi. Selain itu, analisis tata kelola obat dalam JKN mengungkapkan kendala seperti kapasitas produksi yang terbatas. Di sisi lain, upaya untuk mengatasi defisit JKN di Kota Medan melalui penggunaan *strategic purchasing* menghadapi tantangan seperti regulasi yang belum mumpuni dan penyalahgunaan manfaat pelayanan tertentu. Selain itu, evaluasi efektivitas peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) dalam menyelesaikan klaim *dispute* menyoroti pentingnya transparansi dan *strategic purchasing* dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

PEMBAHASAN

***Strategic Purchasing* Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan JKN**

Dalam upaya memperbaiki program JKN, dilakukan serangkaian langkah untuk meningkatkan akses, keadilan, dan kualitas layanan kesehatan bagi peserta. BPJS sebagai penyelenggara layanan berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan dengan menerapkan prinsip *strategic purchasing*. Konsep ini merupakan pengembangan dari model pembiayaan yang bertujuan untuk meratakan distribusi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan dana, meningkatkan akses terhadap layanan sesuai kebutuhan, meningkatkan mutu layanan, dan melindungi keuangan dari risiko penyakit. Adapun pendapat dari (Ainul & Arumsari, 2018) terkait hal yang harus dipertimbangkan dalam *strategic purchasing*, yaitu (1) pelayanan apa yang harus dibeli (*benefit*), (2) terjadi *conflict of interest* yang dikarenakan adanya regulasi yang dinyatakan bahwa dari semua fasilitas kesehatan pemerintah harus bekerja sama dengan BPJS, sedangkan untuk regulasi lain mengatakan bahwa faskes lah yang

bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang harus memenuhi standar dan juga terakreditasi. Menurut TNP2K, 2020 *strategic purchasing* merupakan sistem JKN yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan pembayaran yang bersifat objektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Karima & Oktami, 2024 memberikan gambaran tentang kontribusi program JKN dalam upaya eliminasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Melalui uji coba Pilot *Strategic Health Purchasing* (SHP), terjadi peningkatan signifikan dalam kualitas layanan TBC, pelaporan kasus, dan kualitas data TBC. Selain itu, terjadi peningkatan efisiensi dalam integrasi dan pertukaran data antara BPJS dan program TBC.

***Strategic Purchasing* Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya JKN**

Sejak pelaksanaan program JKN, pemerintah dan BPJS Kesehatan terus melakukan peningkatan melalui serangkaian kegiatan monitoring dan evaluasi. Salah satu aspek yang diperhatikan adalah peningkatan mutu layanan yang sejalan dengan pembayaran pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama yang dimiliki oleh pemerintah. Budiarto, 2019 menyatakan bahwa *Strategic purchase* merupakan kegiatan memberdayakan Badan Kesehatan dan Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) yang menjadi *active purchaser* dan akan memberikan peningkatan koordinasi antara BPJS Kesehatan dan juga Kementerian Kesehatan. *Strategic purchaser* juga masih sehubungan dengan *strategic purchasing*. *Strategic purchasing* yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dijadikan sebagai pembeli dalam program JKN diartikan sebagai kemampuan untuk membeli pelayanan yang preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif untuk memberikan peningkatan pada derajat kesehatan di setiap penduduk dan juga memperoleh hasil semaksimal mungkin (The World Bank, 2018).

Dalam konsep *strategic purchasing*, akan ada penentuan siapa yang bisa bekerja sama sebagai pemberi pelayanan serta penentuan sistem pembayaran yang akan digunakan idealnya yang akan dijadikan sebagai kewenangan dari *purchaser* (Putri, 2018). Feldhaus & Mathauer, 2018 berpendapat bahwa *strategic purchasing* juga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang memiliki hubungan dengan *provider payment* terhadap informasi, seperti performa *provider* ataupun kebutuhan kesehatan penduduk, menyelaraskan pendanaan serta pendapatan untuk mencapai suatu peningkatan efisiensi, akuntabilitas, pengiriman layanan, dan juga ekuitas. Menurut Patcharanarumol et al., 2018 *strategic purchasing* dan *provider-payment method* yang dapat dikatakan baik dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk mendukung *efficiency*, *cost-containment*, dan juga *equity outcomes*.

Penelitian yang dilakukan oleh Guan et al., 2016 ditemukan bahwa sebagian dana kapitasi yang dialokasikan ke Puskesmas tidak dapat langsung dimanfaatkan karena tidak seluruhnya dapat diakomodasi dalam dokumen perencanaan penganggaran puskesmas yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, ditemukan pula permasalahan terkait sisa dana kapitasi yang belum termanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan dan evaluasi sistem penyaluran dana untuk mengoptimalkan pengelolaan sisa dana kapitasi. Pertimbangan perlu diberikan terkait kebijakan penggunaan sisa dana kapitasi, apakah harus mengikuti mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Penguatan regulasi dan optimalisasi peran BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, serta stakeholder lainnya juga diperlukan untuk mendukung penerapan *strategic purchasing*.

Tantangan Dalam Implementasi *Strategic Purchasing* Dalam JKN

Dalam mengimplementasikan sesuatu, tidak jarang kita dihadapkan pada berbagai tantangan. Sejumlah penelitian telah mengidentifikasi beberapa tantangan yang muncul dalam implementasi *strategic purchasing* dalam JKN. Pemerintah menerapkan *strategic purchasing* dikarenakan adanya biaya pengobatan dari pasien yang justru cenderung stagnan, *strategic purchasing* bisa menanggung seluruh pembiayaan dalam pengobatan, dimulai dengan

pelayanan kesehatan sampai menebus resep obat dalam melayani pesertanya (Syifauddin et al., 2023). B.Z.Apostolova, M.J. Kroon, M. Richer, 2015 mengatakan bahwa pembelian strategis (*strategic purchasing*) bisa membangun suatu hubungan dengan penyedia seperti pemerintah secara kolektif untuk menarik biaya dari produk atau bahkan layanan yang diadakan oleh fasilitas kesehatan. Nugraha et al., 2023 mengungkapkan pembelian strategis merupakan suatu pendekatan yang memiliki manfaat jika dilaksanakan dengan benar, yang melalui pembuatan kebijakan berbasis bukti yang efektif, pembelian strategis bisa memberikan suatu informasi juga kepada negara-negara untuk melaksanakan reorientasi pada sistem kesehatan yang berguna untuk memenuhi alokasi sumber daya yang efektif.

Pada penelitian Anggriani et al., 2023 menyoroti beberapa faktor yang memengaruhi input, seperti ketersediaan bahan baku obat, kapasitas produksi, dan regulasi. Kapasitas produksi obat berkaitan erat dengan jumlah obat yang dapat diproduksi oleh industri farmasi. Meskipun rencana kebutuhan obat (RKO) yang diajukan oleh fasilitas kesehatan (fasyankes) kepada Kementerian Kesehatan menjadi acuan penawaran bagi industri farmasi, namun dalam prakteknya, produksi obat seringkali tidak mencapai 100% sesuai dengan RKO. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketersediaan bahan baku pada industri farmasi, terutama ketika permintaan obat melebihi RKO. Regulasi yang ketat terkait bahan baku obat juga menjadi kendala, karena industri farmasi tidak dapat secara bebas mengganti bahan baku jika bahan baku yang umum digunakan tidak tersedia di pasaran. Di sisi lain, penelitian Ahmad et al., 2023 menyoroti tantangan dalam implementasi JKN di kota Medan, termasuk tingkat kepesertaan yang masih rendah (80%), pungutan yang belum optimal, serta beban kesehatan rumah sakit yang tinggi akibat penyakit serius. Tantangan lainnya termasuk kurangnya regulasi yang memadai, belum diperkenalkannya *cost sharing* (*copayment*), kurangnya kerjasama dengan asuransi swasta, belum adanya kebijakan untuk membatasi manfaat layanan tertentu yang mahal dan sering disalahgunakan, serta kurangnya pembekalan dan penelitian terkait Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PNPK). PNPk sangat penting sebagai tolak ukur dalam mengendalikan mutu dan manajemen biaya, serta untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan seperti fragmentasi layanan, penerimaan kembali, dan perawatan yang tidak perlu.

Dalam penelitian oleh Wahidah & Yusuf, 2022 juga diidentifikasi tantangan terkait penjaminan dan pembiayaan pelayanan di Fasilitas Kesehatan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *strategic purchasing* yang tercantum dalam kontrak. Selain itu, terdapat juga kasus klaim *dispute* yang belum sejalan dengan pedoman pengelolaan klaim, terutama dalam kasus pelayanan mata, saraf, dan rehabilitasi medik. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan-tantangan ini guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi *strategic purchasing* dalam JKN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari studi *literature review*, terungkap bahwa perubahan dalam segmentasi pasar, sistem pembayaran, dan kebijakan politik terkait layanan kesehatan memiliki dampak signifikan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang memerlukan evaluasi mendalam. Untuk mengatasi perubahan tersebut, BPJS Kesehatan mengadopsi prinsip *strategic purchasing* guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem kesehatan melalui pengelolaan yang lebih baik dari sumber daya finansial yang tersedia untuk provider layanan kesehatan. Implementasi *strategic purchasing* telah terbukti mampu meningkatkan kualitas layanan JKN sambil memastikan alokasi biaya JKN yang lebih efektif. Namun, tetap ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam menerapkan *strategic purchasing* dalam program JKN, seperti permasalahan terkait regulasi, tingkat kepesertaan yang belum optimal, dan peningkatan koordinasi antara pihak terkait.

- A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2FDocuments%2FPages%2Fundang-undang-nomo
- Kementerian Kesehatan RI. (2009). UU no. 44 Tahun 2009 Tentang RS. *Undang-Undang Republik Indonesia, 1*, 41. <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2009/uu0442009.pdf>
- Patcharanarumol, W., Panichkriangkrai, W., Sommanuttaweechai, A., Hanson, K., Wanwong, Y., & Tangcharoensathien, V. (2018). Strategic purchasing and health system efficiency: A comparison of two financing schemes in Thailand. *PLoS ONE, 13*(4), 1–13. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0195179>
- Prabowo, R. B., Sunariman, I., & Aminda, R. S. (2021). Strategi Bisnis Rumah Sakit Dalam Perspektif Universal Health Coverage (Studi Empiris Berbasis Bukti Pada Rumah Sakit Tipe B). *Jurnal Manajemen, 12*(1), 144. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v12i1.3719>
- Pribadi, F. A., & Setijaningrum, E. (2023). Analisis Prinsip Pembiayaan Kesehatan dalam Mendukung Cakupan Kesehatan Semesta di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik, 15*(2), 60–78. <https://doi.org/10.20473/jap.v15i2.49582>
- Pujiyanti, E., Setiawan, E., Jasmin, E. R., & Suwandi, I. P. (2020). Kajian Literatur Sistematis: Skema Pengendalian Biaya dalam Asuransi Kesehatan Nasional di Beberapa Negara. *Jurnal Ekonomi Kesehatan Indonesia, 4*(2). <https://doi.org/10.7454/eki.v4i2.3460>
- Putri, N. K. (2018). Pemangku Kepentingan dan Tatanan Kebijakan Belanja Kesehatan Strategis dalam JKN. *Belanja Strategis Kesehatan, 23*-62an. [https://repository.unair.ac.id/124860/1/C.02_ARTIKEL_Belanja Kesehatan Strategis.pdf](https://repository.unair.ac.id/124860/1/C.02_ARTIKEL_Belanja%20Kesehatan%20Strategis.pdf)
- Rusady, M. (2016). Kenyataan, Harapan Dan Solusi Jkn Dari Aspek Badan Penyelenggara. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKDxeERgVkJEcEPnvnLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1678096132/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fdokumen.tips%2Fdocuments%2Fharapan-kenyataan-dan-solusi-penyelenggaraan-jkn-terintegrasi-dan-di-reviu-secara.html/
- Syifauddin, M. R., Hatta, I. H., & Sarnianto, P. (2023). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pembelian Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Apotek Di Kecamatan Serang. *JRB-Jurnal Riset Bisnis, 6*(2), 243–258. <https://doi.org/10.35814/jrb.v6i2.4640>
- The World Bank. (2018). Functional and Regulatory Review of Strategic Health Purchasing Under JKN. *South African Medical Journal, 15 July 2018, 7*.
- TNP2K. (2020). Kajian Kebijakan Pengadaan Obat Untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2018. In *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*.
- Wahidah, M., & Yusuf, I. (2022). Efektivitas Peran dan Fungsi Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Memberikan Rekomendasi Penyelesaian Dispute Klaim Tahun 2021. *Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional (JJKN), 2*(2), 109–122. <https://doi.org/10.53756/jjkn.v2i2.78>
- Zeplin Jiwa Husada Tarigan. (2009). Dukungan Manajemen Puncak terhadap Strategic Purchasing dalam Berkomunikasi dan Berkolaborasi dengan Supplier untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 11*(2), pp.126-133. <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/man/article/view/17969>